

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang semakin pesat, menghasilkan manfaat positif bagi kehidupan manusia dan memberi banyak kemudahan, seperti kemudahan dalam memperoleh informasi dan kemudahan bertransaksi karena segala kegiatan dapat dilakukan dengan cepat, murah, dan tepat. Sehingga produktifitas kerja akan meningkat. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memperlihatkan bermuncunya berbagai jenis kegiatan yang berbasis pada teknologi ini, seperti dalam dunia bisnis, (e-commerce), perbankan (e-banking), pemerintahan (e-government), data kependudukan (e-KTP), pendidikan (e-education Learning), kesehatan (e-medicine, e-laboratory), dan lain sebagainya yang kesemuanya itu berbasis elektronik. Pemerintah menerapkan e-government yang bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, transparan, bersih, adil, akuntabel, bertanggung jawab, responsive, efektif dan efisien. E-government. Memanfaatkan kemajuan komunikasi dan informasi pada berbagai aspek kehidupan, serta untuk meningkatkan daya saing dengan 1ublic – 1ublic lain. Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi Elektronik. E-government merupakan 1ublic pemerintah dengan berbasis elektronik agar dapat memberikan kenyamanan, meningkatkan transparansi, dan meningkatkan interaksi masyarakat, serta meningkatkan partisipasi public. Salah satu penerapan implementasi e-government dalam pelayanan public dengan penggunaan teknologi dan informasi yang saat ini sedang dilaksanakan dalam bidang pemerintah adalah e-KTP (Elektronik Kartu Tanda Penduduk).

Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar memerlukan data kependudukan yang akurat, untuk itu pemerintah membuat program e-KTP. E-KTP merupakan cara baru yang akan ditempuh oleh pemerintah dengan

database kependudukan secara nasional untuk memberikan identitas kepada masyarakat dengan menggunakan 2ublic biometric yang ada didalamnya, maka setiap pemilik e-KTP dapat terhubung dalam satu database nasional, sehingga setiap penduduk hanya memerlukan satu KTP saja. E-KTP merupakan salah satu program nasional yang harus dilaksanakan oleh pemerintah di setiap daerah, karena pelaksanaan e-KTP dipandang sangat relevan dengan rencana pemerintah dalam upaya menciptakan pelayanan public yang berkualitas dan berbasis teknologi untuk mendapatkan hasil data kependudukan yang lebih tepat dan akurat.

Kota Jayapura sangat muda diakses dari laut maupun udara dari luar daerah. Akibatnya jumlah penduduk kota Jayapura bertambah karena migrasi masuk. Sarana angkut yang digunakan dari laut berupa kapal PELNI. Dalam satu minggu terdapat dua kali kapal masuk ke Jayapura. Meskipun secara de jure penduduk yang datang merupakan warga kota Jayapura tetapi hanya berstatus domisili. Kartu tanda penduduk merupakan penduduk daerah dan di wilayah papuan lain. Maka pemerintah kota Jayapura melalui dinas kependudukan dan catatan sipil menyelenggarakan perekaman e-KTP melalui pendekatan kelompok sasaran di berbagai tempat, misalnya ditempat – tempat penyelenggara perekaman kantor Dukcapil, di kantor – kantor kelurahan, di mall-mall, door to door rumah warga dan tempat kerumunan masyarakat. Tujuannya untuk memudahkan masyarakat dalam memfasilitasi penduduk dan mendapatkan e-KTP kota Jayapura. Sebab mahasiswa atau pedagang “ banyak yang bertahun tinggal di kota di kota Jayapura tapi belum memiliki e-KTP Kota Jayapura. Sebenarnya tinggal di kota Jayapura melebihi dari 6 (bulan) maka otomatis memiliki e-KTP Kota Jayapura Agar seluruh penduduk kota Jayapura mencapai wajib e-KTP.

Mengenai kebijakan pembuat e-KTP ini telah diatur dalam UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2009 Tentang penerapan KTP Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, Peraturan Presiden No. 35 Tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan Presiden No. 26 Tahun 2009. Dalam permedagri No. 8 Tahun

2016 tentang perubahan kedua atas Permedagri No. 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional. Untuk itu, pemerintah perlu melaksanakan program e-KTP dengan sebaik-baiknya, sehingga nantinya akan mempermudah masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dari lembaga pemerintah dan swasta karena e-KTP merupakan KTP elektronik yang dibuat dengan 3ublic computer, sehingga dalam penggunaannya nanti diharapkan lebih mudah, cepat, dan akurat. Elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) Merupakan dokumen kependudukan yang memuat 3ublic keamanan atau pengendalian baik dari sisi administrasi maupun teknologi informasi dengan berbasis pada database kependudukan nasional. Penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1(satu) e-KTP yang tercantum Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK merupakan identitas tunggal setiap penduduk dan berlaku seumur hidup. NIK yang ada di e-KTP nantinya akan dijadikan dasar dalam menerbitkan paspor, Surat Izin Mengemudi (SIM), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Polis Asuransi, Sertifikat Atas Hak Tanah, dan Penerbitan Dokumen Identitas Lainnya. Pemerintah membuat kebijakan baik bagi masyarakat, bangsa dan 3ublic dimaksudkan agar terciptanya tertib administrasi. Selain itu, dengan adanya e-KTP ini tentunya masyarakat dapat mendukung peningkatan keamanan 3ublic melalui tertutupnya peluang adanya KTP ganda atau KTP palsu dimana selama ini para pelaku criminal termasuk teroris, TKI 3ublic3 dan perdagangan.

1.2. Rumusan Masalah

Menurut Winarno Surakhmad (1998 : 34), masalah adalah setiap kesulitan yang mengerakkan manusia untuk memecahkan, dengan demikian masalah merupakan suatu kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang perlu mendapatkan pecahannya. Hal itupun didukung oleh pendapat S.P Siagian (1984 : 54) yang menyatakan bahwa masalah adalah sebuah penyimpangan dari standar tertentu atau sesuatu dan tingkat dimensi tertentu yang cukup penting unutm mencapai suatu pemecahan.

Dan berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka masalah yang terdapat dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut;

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan e-KTP di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Jayapura.
2. Apa saja factor-faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan e-KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan e-KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura.
2. Untuk mengetahui factor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan e-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat atau kegunaan penelitian merupakan dampak atau terapainya tujuan penelitian. Untuk itu, kegunaan hasil penelitian ini mencakup beberapa hal :

1. Secara teoritis
 - a. Menambah ilmu pengetahuan melalui penelitian yang dilaksanakan sehingga memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan Ilmu Administrasi Negara khususnya mata kulia Kebijakan Public dan e-government
 - b. Sebagai bahan pemahaman dan pembelajaran bagi peneliti dan mahasiswa lain untuk melakukan penelitian-penelitian secara lebih mendalam mengenai pelaksanaan pembuatan e-KTP yang sedang berjalan di Kota Jayapura
2. Secara Praktis
 - a. Bagi pemerintah daerah, diharapkan nantinya dapat dijadikan sebuah penilaian yang logis bagi pemerintahan daerah untuk lebih maksimal lagi dalam menangani pelaksanaan pembuatan e-KTP di Kota Jatapura

- b. Bagi masyarakat, diharapkan nantinya dapat membuka ruang kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam pengawasan pelaksanaan e-KTP yang saat ini sedang berjalan
- c. Bagi peneliti, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan skripsi.